

Fatwa yang dismapikan oleh seorang mufti kepada masyarakat diharapkan tidak keluar dari prinsip *maqāsid al-Sharī* dan *maslahah*, yaitu untuk menciptakan kehidupan yang dinamis, tentram, menciptakan kebahagiaan dan persatuan antar ummat manusia di muka bumi-Nya. Oleh karena itu mufti adalah seorang pencerah yang menciptakan kedamaian di tengah-tengah kemajemukan masyarakat.

Fatwa yang dihasilkan oleh Rasulullah, para sahabat, *Tābi'īn* (baca: murid shabat) *Tābi'it al-Tābi'īn* para Imam *madhab* memberikan pencerahan dan kedamaian hidup untuk umat manusia, menciptakan kerukunan dan keindahan, tidak hanya untuk ummat muslim saja, tetapi orang non islam sekalipun merasa terayomi dengan fatwa-fatwa mereka. Hal ini dikarenakan bahwa fatwa-fatwa mereka muncul dari *dawābīṭ* yang tidak hanya sesuai dengan kaidah a-Qur'an dan Sunnah, tetapi juga sesuai dengan kebutuhan umat manusia. Fatwa mereka sesuai dengan zaman, tempat dan kedaan masyarakatnya, dengan kata lain "*Yasuhu likulli zamān wa makān*".

Di tengah perubahan zaman yang kita alami sekarang, umat Islam dihadapkan pada fitnah besar dalam agama ini, yaitu dengan bermunculanya mufti-mufti ilegal, baik di media elektronik, maupun media cetak, seperti televisi, majalah, koran dan radio. Dengan standar kapasitas keilmuan yang pas-pasan, bahkan tidak mumpuni, apalagi penguasaan terhadap *dawābīṭ* yang telah

dirumuskan oleh para ulama', mereka memberikan keterangan hukum kepada masyarakat secara online tanpa harus mengetahui kondisi mustaftinya.

Maka dari itu, tidak jarang jika mereka sering melakukan kesalahan-kesalahan fatal dalam berfatwa. Ketidak fahaman mereka akan *dawābitiftā'*, bagaimana fatwa itu harus disampaikan, dan bagaimanapula dia harus berfatwa, menjadikan fatwa yang dikeluarkan mereka jauh dari *Rūh al-Sharī'ah* yang membingungkan, meresahkan bahkan menyulutkan api kebencian dan permusuhan di antara sesama umat Islam sendiri. Akibatnya fatwa yang bertujuan untuk menciptakan kedamaian hidup, menciptakan solusi, mempersatukan umat beralih fungsi menjadi fitnah yang memperpecah umat.

Hal ini dikarenakan bahwa memberikan fatwa bukanlah pekerjaan memindah teks al-Qura'n dan al-Hadits kepada khalayak umum sebagaimana yang dilakukan oleh para dai. Dalam hal ini Imam al-Qarāfi mengatakan : "Barang siapa yang berfatwa dengan apa yang ada di dalam kitab, maka, sesungguhnya orang tersebut telah sesat dan menyesatkan". Orang yang berfatwa dengan hanya mengandalkan teks hadith atau keterangan hukum dari para ulama' adalah memberikan keterangan hukum yang tidak sesuai kondisi zaman yang riil.

Para sahabat ketika dimintai fatwa, mereka mengalihkannya kepada para sahabat yang lain, sahabat yang lainpun mengalihkannya kepada sahabat lain hingga akhirnya pertanyaan tersebut kembali kepada sahabat yang pertama.

Rabī'ah al-Ra'yu, seorang Tābi'īn terkemuka selalu berdoa: “ya Allah jauhkanlah saya dari fitnah ini”, Imam Ahmad mensyaratkan seorang mufti hafal empat ratus ribu hadith, riwayat lain mengatakan lima ratus ribu hadith lengkap dengan *ikhwal sanadnya* dan kandungan hukumnya, hal ini menandakan bahwa untuk menjadi seorang mufti dibutuhkan syarat yang sangat berat. Imam Syafi'i memberikan syarat yang sangat rumit bagi seorang mufti, yang mana seakan-akan syarat tersebut tidak bisa dipenuhi kecuali seorang Nabi.

Suatu ketika Rabi'ah Ibn Abdirrahman terlihat menagis tersedu-sedu, seorang laki-laki bertanya kepadanya, apa yang terjadi padamu wahai Imam? Apakah ada musibah yang menimpamu, Ia menjawab, tidak, tetapi seorang yang tidak mempunyai ilmu dimintai fatwa, kemudian ia berfatwa, maka ia sendiri telah sesat dan menyesatkan orang lain, Orang ini lebih layak untuk dipenjarakan dari pada orang yang mencuri.³

Diriwayatkan bahwa ketika Imam Malik dimintai fatwa, maka seakan-akan ia berada di depan pintu sorga dan neraka, ia mengatakan: “sesungguhnya saya tidak berfatwa sebelum saya mendapatkan pengakuan dari tujuh puluh syaikh saya, jika mereka melarang saya, maka sayapun akan diam”.⁴

³ Majdi Abdul Ghani, *Muqaddimah Dawābit fatwa Muhammad Ibn Ali Husain*, (Iskandariyyah, Dār a-Furqān, 1997) , : 06

⁴ Iibid : 11

Jika kita bandingkan zaman kita dengan zaman ulama' *madhab* di atas, maka kita akan mendapatkan perbedaan yang sangat jauh, bagaikan bumi dan langit, mereka sangat berhati-hati dan menghindari memberikan fatwa, tetapi pada zaman kita sekarang ini, kita melihat orang yang tidak mempunyai keilmuan yang memadai berani berfatwa memberikan keterangan hukum di media elektronik dengan hanya bermodalkan hafalan *hadīth arbain al-Nawīyyah* tanpa dilengkapi dengan ilmu Ijtihad.

Mufti-Mufti ilegal seperti inilah yang menjadi fitnah di tengah perubahan zaman kita. Vonis kafir, Syirik, jahil, sesat, bid'ah, halal darahnya, menjadi makanan sehari-hari kita yang kita dengar. Seakan-akan mereka tidak mempunyai hafalan kosakata lain selain itu.

Untuk menghindari fitnah ini, maka pemerintah wajib melarang orang yang tidak mempunyai kapasitas dalam berfatwa agar tidak berbicara tentang hukum Allah secara online seperti televisi, radio dan sebagainya. Merumuskan undang-undang perfatwaan dan mengawasi jalanya perfatwan yang beredar, membuat sertifikat fatwa kepada orang yang memenuhi syarat. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh pemerintahan Bani Umawiyah ketika banyak beredar para mufti-mufti ilegal yang meresahkan Ummat.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Ruang lingkup permasalahan fatwa sangat banyak sekali, meliputi, mufti (orang yang memberikan fatwa), mustafti (orang yang meminta fatwa), kaidah dan *dawābīṭ* yang harus dikuasai oleh seorang mufti dalam menyampaikan fatwa, *dawābīṭ fatwa* (kaidah dan rumusan bagaimana fatwa tersebut disampaikan), majlis fatwa, manhaj fatwa, sejarah perkembangan fatwa, peran fatwa dalam mengembangkan masyarakat moderen, fatwa kolektif, campur tangan pemerintah dan masyarakat dalam mendukung perfatwaan yang ada.

Agar permasalahan tetap focus dan tidak teralu melebar maka peneliti perlu membuat batasan-batasan masalah, sehingga tujuan dari penelitian bisa dicapai. Menetapkan batasan-batasan masalah dengan jelas sehingga memungkinkan penemuan faktor-faktor yang termasuk ke dalam ruang lingkup masalah dan yang tidak. Untuk itu, peneliti membatasi pada bahasan: Bagaimanakah kondisi fatwa yang ada di tengah perubahan zaman sekarang ini? Kerancauan-kerancauan apa saja terkait denganya? apa syarat-syarat dan *dawābīṭ* yang harus dipenuhi oleh seorang mufti dalam berfatwa ? *Dawābīṭ* fatwa yang harus dipenuhi, kemudian kerancauan-kerancauan apa sajakah yang terjadi pada fatwa kontemporer sa'at ini, bagaimana proses pengambilan fatwa, opsional fatwa di tengah perubahan zaman, serta bagaimana sikap pemerintah dalam menanggapi fatwa yang ada.

3. Untuk mengetahui apa penyebab-penyebab penyelewengan fatwa, dan bagaimana sikap pemerintah pada dunia perfatwaan.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran terhadap perkembangan Hukum Islam yang secara terus menerus dikaji untuk menegakan kebenaran, keadilan berdasarkan al-Qur'an dan al-Sunah.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat Memperkenalkan pada masyarakat umum betapa sangat pentingnya keberadaan seorang mufti dan lembaga-lembaga fatwa di tengah-tengah mereka.
3. Meningkatkan kepedulian kepada masyarakat untuk hidup bersyari'at kepada Allah. Yang mana semua apa yang dilakukan sepanjang hari tidak lepas dari hukum Allah yang harus diketahui oleh mereka.

F. Kerangka Teoritik

Dalam penulisan penelitian ini teori yang digunakan oleh peneliti adalah Teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* dan *Maslahah*, teori ini adalah untuk mewujudkan bahwa setiap fatwa yang diambil oleh seorang mufti sejalan dengan konsep *Maqāṣid al-Sharī'ah*

minum khamr, dengan alasan bahwa Allah mengharamkan khamr karena ia melalaikan seseorang dari mengingat Allah dan shalat, sedangkan dengan meminum khamr mereka akan lalai untuk memerangi orang muslim dan merampas harta benda mereka, maka dari itu Ibn Taymiyyah tidak mengharamkan khamr atas mereka, mereka karena jika diharamkan, maka akan menimbulkan *mafsadah* yang lebih besar yaitu mereka akan memerangi orang-orang muslim dan merampas harta bendanya.⁶

Contoh lain adalah, fatwa Ibn Abbas ketika dimintai fatwa seorang laki-laki yang datang kepadanya, "apakah orang yang membunuh dengan sengaja mempunyai kesempatan untuk bertaubat", Ibn Abbas menjawab : tidak, orang yang duduk bersama Ibn Abbas berkata: beginikah engkau memberikan fatwa kepada kami, padahal sebelumnya engkau berfatwa kepada kami bahwa orang yang membunuh diterima taubatnya, Ibn Abbas menjawab: sesungguhnya aku lihat dia dalam keadaan marah dan ingin membunuh orang mu'min, jika aku berfatwa bahwa ia mempunyai kesempatan untuk bertaubat, maka dia akan membunuh orang mu'min.⁷

Adapun contoh fatwa kontemporer yang sesuai dengan *maqāṣid al-shari'ah* adalah fatwa dibolehkannya melempar jumrah pada waktu haji sebelum *zawāl*.

⁶ Ibn Qayyim, 'Ilām, 03/05.

⁷ Usamah al-Asyqar, *faudh al-ftā'*, : 43, lihat lebih lanjut *Musnaf Ibn Abi Syaibah*, Bab *man qāla lilqātil al-taubah*, 05/345.

G. Penelitian Terdahulu

Setelah melakukan beberapa observasi kami menemukan bahwa telah terdapat penelitian tentang fatwa yang dilakukan oleh Zainal Fanani Mahasiswa Universitas Negeri Malang pada tahun 2009 dengan judul skripsinya "FATWA DALAM PRESPEKTIF YURIDIS NORMATIF, KAJIAN ATAS POSISI DAN AKIBAT HUKUM FATWA MUI". Hasil penelitiannya mengemukakan pengaruh fatwa MUI dan pentingnya dalam kehidupan Masyarakat.

Penelitian kedua dilakukan oleh Zulkifli Mohamad dengan judul skripsinya "INSTITUSI MUFTI DAN FATWA SATU ANALISA TERHADAP ENAKMEN DAN BEBERAPA FATWA PILIHAN NEGERI SEMBILAN MALAYSIA. Sekripsi ini membahas tentang istitusi lembaga fatwa yang ada dimalaysia, penelitiannya lebih menekankan terhadap analisa fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga fatwa.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh : Wan Zulkifli bin Wan Hassan, dengan judul tesisnya : "Pengaruh Mazhab Shafi'i Dalam Fatwa Mengenai Zakat di Terengganu: Kajian Dari Tahun 1953 - 2005". Penelitian ini menitik tekankan fatwa-fatwa dalam kitab-kitab Madhab Syafi'i dan pengaruhnya kepada zakat di daerah Trengganu Malaysia, yang diambil hanya mengenai fatwa-fatwa seputar zakat.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh : Andi Cahyono, dengan judul tesisnya : Aplikasi fatwa dsn-mui tentang murabahah terhadap praktik pembiayaan murabahah pada lembaga keuangan mikro syariah di surakarta periode tahun 2010. Tesis ini membahas tentang aplikasi fatwa MUI dan pengaruhnya kepada praktek mudharabah pada keuangan mikro syariah yang ada di Surakarta.

Dari empat penelitian terdahulu diatas, terdapat perbedaan dengan apa yang akan kami tulis diatas, karena semua penelitian diatas membahas tentang institusi fatwa baik yang ada di Malaysia dan Indonesia dan prakteknya pada salah satu permasalahan fiqh, yaitu zakat dan *mudharabah*. Sedangkan yang akan kami bahas disini adalah bagaimana manhaj dan konsep yang harus dikuasai oleh pemberi fatwa di era globalisasi sekarang ini, terlebih khusus para pemberi fatwa yang ada di media elektronik seperti televisi. Maka dari itu penelitian yang kami lakukan ini orisinal dan baru, dengan artian tidak pernah dijumpai penelitian yang serupa.

Kerangka teoritik, penelitian terdahulu, Metode penelitian, sistematika pembahasan, outline penelitian.

Bab kedua kajian Teori. Pada bab ini dijelaskan tentang landasan teori yang dijadikan bahan untuk mengkaji tema yang diangkat dalam penelitian ini, sekaligus rumusan masalah yang menjadi focus penelitian. Sedangkan bahan yang diuraikan dalam bab ini meliputi Pengertian Fatwa, Perbedaan antara fatwa *Qadha'* dan *Ijtihād*. Landasan hukum fatwa, hukum fatwa, *Ṣighāt* Fatwa, Fatwa Dalam Sejarah, Urgenitas Fatwa Dan Pengaruhnya Dalam Membangun Masyarakat Moderen, Dampak negatif fatwa yang salah yang muncul dari orang yang bukan ahlinya. Peran *Iftā* Dalam Mengembangkan Masyarakat Moderen, Ruang Lingkup Fatwa (*Majāḷ al-fatwa*).

Bab ketiga, pada bab ketiga ini kami akan membahas tentang *ḍawābīṭ Mufti*, baik *ḍawābīṭ al-Muttafaq alaiha* dan *Mukhtalaf alaih*, serta *ḍawābīṭ* mufti ditengah perubahan zaman. Serta akan kami paparkan juga sebab-sebab penyimpangan fatwa ditengah perubahan zaman. Macam-macam mufti dan adab-adab yang harus dipenuhi olehnya.

Bab keempat, dalam bab ini akan dijelaskan *ḍawābīṭ- ḍawābīṭ*. *Iftā'*, yaitu bagaimana cara pengambilan fatwa sesuai dengan *ḍawābīṭ* yang telah dirumuskan oleh para Ulama', kemudian disambung dengan metode-metode fatwa di tengah perubahan zaman, *Ḍawābīṭ Ifta'* di Media Elektronik, *ḍawābīṭ*

